



## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2018**



**DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**JALAN BASUKI RAHMAT NO. 1 GEDUNG A KANTOR GUBERNUR LAMA**

## **KATA PENGANTAR**

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Renstra 2013-2018). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan perannya sebagai salah satu Dinas Teknis yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyediaan infrastruktur daerah yang mendukung perwujudan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagaimana tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2013-2018, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum telah menghasilkan rancangan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta telah menyelesaikan berbagai program dan kegiatan yang tertuang didalamnya secara maksimal.

Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018, seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2018. Selanjutnya hasil pencapaian keberhasilan kinerja tersebut akan dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan informasi dan pertanggung jawab atas pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kupang, Februari 2019  
a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Sekretaris,

**ROSYE MARIA HEDWINE, ST, MSI**

Pembina  
NIP. 19751027 200112 2 001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode 2013-2018. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2018 adalah :

- 1) Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Air dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak air;
- 2) Mewujudkan Sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi;
- 3) Menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif dan kompetitif dan
- 4) Meningkatkan keandalan konstruksi melalui uji mutu pada laboratorium dengan memanfaatkan teknologi sesuai Norma, Standar, Pedoman dan Manual

Dinas Pekerjaan Umum telah menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja tahun ke 5 (lima). Penetapan Kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2013-2018.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyelesaikan berbagai program kegiatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyediaan infrastruktur yang mendukung peningkatan perekonomian daerah.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 STRUKTUR ORGANISASI .....	2
1.2 TUGAS DAN FUNGSI .....	2
1.3 KEADAAN PEGAWAI .....	3
1.4 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA .....	8
1.5 KEUANGAN .....	9
1.6 SISTEMATIKA LAKIP .....	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
2.1 RENCANA STRATEGIS .....	11
2.1.1 VISI DAN MISI .....	11
2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN .....	12
2.1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	16
2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 .....	19
2.3 RENCANA ANGGARAN .....	24
2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG .....	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	28
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 .....	28
3.2 AKUNTABILITAS KINERJA .....	28
3.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN .....	45
BAB IV. PENUTUP .....	49
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP).

LKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP Dinas ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian kinerja tahun 2018 dan capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

Pengelolaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 298.499.470.900,- ditujukan untuk:

1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air (SDA), dalam mendukung ketersediaan air baku dan irigasi melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.
2. Mewujudkan sistem jaringan jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa .
3. Melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi NTT terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang. Sekretariat terdiri atas Sub Bagian-Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Seksi-Seksi. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

[illegible]

## 1.2 TUGAS DAN FUNGSI

2

Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3 KEADAAN PEGAWAI

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 317 orang Pegawai Negeri Sipil. Klasifikasi jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT disajikan pada gambar dan tabel dibawah ini :

Gambar 1.1  
Grafik jumlah Pegawai Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Jenis Kelamin  
Per 31 Desember 2018



Tabel I.1  
Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Golongan  
Per 31 Desember 2018

JENIS KELAMIN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	7	94	118	13	<b>232</b>
Perempuan	0	17	66	2	<b>85</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>111</b>	<b>184</b>	<b>15</b>	<b>317</b>

Tabel I.2  
Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Eselon  
Per 31 Desember 2018

JENIS KELAMIN	ESELON				JUMLA H
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	-	1	5	14	<b>20</b>
Perempuan	-	-	1	4	<b>5</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>25</b>

Tabel I.3  
Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Per 31 Desember 2018

JENIS KELAMIN	TINGKAT PENDIDIKAN									JML
	S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	SLTA	SLTP	SD	
Laki-Laki	1	14	72	14	21	3	94	7	6	<b>232</b>
Perempuan	0	5	47	3	9	0	20	1	0	<b>85</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>119</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>114</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>317</b>



Tabel I.4  
Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT  
Berdasarkan Pendidikan/Jurusan  
Per 31 Desember 2018

TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN		JUMLAH
	TEKNIK	NON TEKNIK	
SD	0	6	<b>6</b>
SLTP	0	8	<b>8</b>
SLTA	28	86	<b>114</b>
DI/DII	3	0	<b>3</b>
D.III	27	3	<b>30</b>
D.IV	16	1	<b>17</b>
S1	67	52	<b>119</b>
S2	12	7	<b>19</b>
S3	1	0	<b>1</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>161</b>	<b>180</b>	<b>317</b>

Tabel I.5  
Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Usia  
Per 31 Desember 2018

USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
≥56	21	2	<b>23</b>
51 – 55	52	20	<b>72</b>
46 – 50	46	11	<b>57</b>
41 – 45	51	15	<b>66</b>
36 – 40	44	26	<b>70</b>
31 – 35	15	8	<b>23</b>
26 – 30	3	3	<b>6</b>
21 – 25	-	-	<b>-</b>
≤ 20	-	-	<b>-</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>232</b>	<b>85</b>	<b>317</b>

Tabel I.6  
Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Agama  
Per 31 Desember 2018

AGAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Islam	21	5	<b>26</b>
Protestan	135	56	<b>191</b>
Katolik	76	24	<b>100</b>
Hindu	0	0	<b>0</b>
Budha	0	0	<b>0</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>232</b>	<b>85</b>	<b>317</b>

Tabel I.7

Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Unit/Bidang Kerja  
Per 31 Desember 2018

Unit/Bidang Kerja	Jenis Kelamin		JUMLAH
	Laki-Laki	Perempuan	
Sekretariat	28	24	52
Bidang SDA-I/BWS	77	19	96
Bidang BP-TJK	22	10	32
Bidang Bina Marga	80	13	93
Bidang OP SDA-I	15	10	25
BLUD	2	2	4
Bidang Tata Ruang	8	7	15
JUMLAH	232	85	317

#### 1.4 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan pelayanan diperlukan sarana dan prasarana SKPD yang memadai, adapun keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel I.8  
Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Prov NTT  
Per 31 Desember 2018

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi dan Jumlah			Jumlah (unit)
		Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	48	-	-	48
2	Kendaraan Roda 6	5	-	-	5
3	Kendaraan Roda 4	78	-	4	82
4	Kendaraan Roda 2	70	-	24	94
5	Komputer Desktop	36	-	-	36
6	Komputer Laptop	31	-	-	31
7	UPS	2	-	-	2
8	Air Conditioning (AC)	15	-	-	15

*Sumber data : Buku Inventaris Dinas PPRU Prov NTT 2018*

## 1.5 KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 298.499.470.900,- dengan rincian disajikan sebagai berikut :

Tabel I.10  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas PUPR Prov NTT  
Tahun Anggaran 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berubah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	-	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	-	-
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAMA	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	-	-
	Jumlah Pendapatan	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	-	-
5.	BELANJA DAERAH	298.935.060.000,00	298.499.470.900,00	9.564.410.900,00	3,3
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.732.393.000,00	22.634.737.000,00	(2.097.656.000,00)	(8,5)
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	24.732.393.000,00	22.634.737.000,00	(2.097.656.000,00)	(8,5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	264.202.667.000,00	275.864.733.900,00	11.662.066.900,00	4,4
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.677.108.000,00	8.893.883.000,00	216.775.000,00	2,5
5.2.2.	BELANJA BAKANG DAN JASA	30.295.671.200,00	36.021.209.200,00	5.725.538.000,00	18,9
5.2.3.	BELANJA MODAL	225.229.887.800,00	230.949.641.700,00	5.719.753.900,00	2,5
	Jumlah Belanja	298.935.060.000,00	298.499.470.900,00	9.564.410.900,00	3,3
	Surplus/(Defisit)	(284.085.060.000,00)	(294.249.470.900,00)	(9.564.410.900,00)	3,4

Sumber data : DPPA-SKPD : BPPKAD.IV/900.910/DPPA/2018 (Dinas PUPR Prov NTT 2018)

## **1.6 SISTEMATIKA LKIP**

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 sebagai berikut:

### **Ikhtisar Eksekutif**

#### **Bab I: PENDAHULUAN**

Memuat gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekilas pengantar lainnya

#### **Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam bab ini diikhsarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja (dokumen Penetapan Kinerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja

#### **Bab IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur

#### **Lampiran-lampiran**

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

##### 2.1.1 VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 serta tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pekerjaan umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka ditetapkan visi Dinas Pekerjaan Umum periode tahun 2013-2018 yakni :

***“Tersedianya infrastruktur pekerjaan umum berbasis penataan ruang yang andal dalam mendukung pengembangan wilayah agar terwujud masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis”***

Untuk mencapai Visi ini maka ditetapkan pula Misi yang merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi, sekaligus juga akan memberikan arah serta batasan proses pencapaian tujuan. Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berdasarkan Indikator kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air, dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konservasi sda, pendayagunaan sda dan pengendalian daya rusak air.
2. Mewujudkan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.
3. Melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
4. Menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif dan kompetitif.
5. Meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi yang profesional dan memadai.

6. Mengoptimalkan peranan lembaga pengembangan jasa konstruksi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyedia jasa.
7. Melakukan penyusunan program, evaluasi dan pengendalian yang berorientasi pada prioritas dan keseimbangan wilayah.
8. Meningkatkan pengelolaan peralatan dan perbengkelan.
9. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia aparatur.
10. Melakukan tindakan perbaikan infrastruktur dalam rangka tanggap darurat bencana.

## **2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN**

### **2.1.2.1 TUJUAN**

Tujuan adalah instrument yang menjabarkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisi upaya melakukan perubahan kea rah yang lebih baik.

Mengacu pada Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan, yaitu “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum Berbasis Penataan Ruang Yang Andal Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah agar Terwujud Masyarakat NTT Yang Berkualitas, Sejahtera Dan Demokratis”, serta misi yang telah ditargetkan maka ditetapkan Tujuan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018.

Adapun tujuan tersebut antara lain :

A. MISI	B. TUJUAN
Mewujudkan pengelolaan sumber daya air, dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air	Mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku
Mewujudkan Sistem jaringan Jalan untuk meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Barang dan Jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa



Melaksanakan penataan ruang wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	Melaksanakan Penataan ruang wilayah Provinsi
Menciptakan iklim usaha Jasa Konstruksi yang kondusif dan kompetitif	Peningkatan kualitas Usaha jasa Konstruksi
Meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi yang profesional dan memadai	Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi
Mengoptimalkan peran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyedia jasa	Terciptanya struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi dengan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas
Melakukan penyusunan Program, Evaluasi dan Pengendalian yang berorientasi pada Prioritas dan Keseimbangan Wilayah	Meningkatnya kualitas penyusunan program/kegiatan Bidang PU dan Penataan Ruang serta peningkatan kualitas pengendalian bagi terwujudnya pembangunan
Meningkatkan keandalan Konstruksi melalui Uji Mutu dengan memanfaatkan Teknologi sesuai Norma, Standar, Pedoman dan Manual	Optimalisasi pelayanan Jasa Pengujian dan Laboratorium
Meningkatkan Pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan	Meningkatnya Pengelolaan Peralatan Perbengkelan
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM Aparatur
Melakukan tindakan perbaikan infrastruktur dalam rangka tanggap darurat bencana	Memperbaiki infrastruktur dlm rangka tanggap darurat bencana

#### 2.1.2.2 SASARAN.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

**Misi 1.** Mewujudkan pengelolaan sumber daya air, dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air

TUJUAN	SASARAN
Mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Air Meningkatnya Pendayagunaan Sumber Daya Air Menurunnya tingkat kerusakan bantaran dan tanggul sungai

**Misi 2.** Mewujudkan Sistem jaringan Jalan untuk meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Barang dan Jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa	Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

**Misi 3.** Melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN
Melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi	Terciptanya ruang wilayah provinsi sesuai RTRW yang telah ditetapkan

**Misi 4.** Menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif dan kompetitif

TUJUAN	SASARAN
Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi	Meningkatnya profesionalisme Badan Usaha Jsa Konstruksi

**Misi 5.** Meningkatnya kualitas tenaga kerja konstruksi yang professional dan memadai

TUJUAN	SASARAN
Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat

**Misi 6.** Mengoptimalkan peran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyedia jasa

TUJUAN	SASARAN
Terciptanya struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi dengan hasil pekerjaan yang berkualitas	Meningkatnya kinerja Lembaga dalam pengembangan jasa konstruksi NTT

**Misi 7.** Melakukan penyusunan program, evaluasi dan pengendalian yang berorientasi pada prioritas dan keseimbangan wilayah

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya kualitas penyusunan program/kegiatan bidang PU dan Penataan Ruang serta peningkatan kualitas pengendalian bagi terwujudnya pembangunan	Terlaksananya penyusunan program serta evaluasi dan pengendalian program / kegiatan bidang PU dan penataan ruang

**Misi 8.** Meningkatkan keandalan konstruksi melalui uji mutu dengan memanfaatkan teknologi sesuai norma, standar, pedoman dan manual

TUJUAN	SASARAN
Optimalisasi pelayanan jasa pengujian dan laboratorium	Terlaksananya pengujian dan laboratorium sesuai standar dan peraturan yang berlaku

**Misi 9.** Meningkatkan pengelolaan perlatan dan perbengkelan

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya pengelolaan peralatan perbengkelan	Optimalisasi produktifitas peralatan dan perbengkelan

**Misi 10.** Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia aparatur

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM Aparatur	Peningkatan kompetensi Aparatur sesuai bidang tugasnya

**Misi 13.** Melakukan tindakan perbaikan infrastruktur dalam rangka tanggap darurat bencana

TUJUAN	SASARAN
Memperbaiki infrastruktur dalam rangka tanggap darurat bencana	Mengembalikan fungsi dasar infrastruktur yang rusak akibat bencana

### 2.1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1. di bawah ini :

TABEL 2.1

Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2013 – 2018

STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Air Baku Melalui Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air</b>	
1. Membangun serta mengoptimalkan bangunan penampung air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Embung Kecil</li> <li>• Rehabilitasi/ Pemeliharaan Embung Kecil</li> </ul>
2. Membangun/ meningkatkan serta mengoptimalkan bangunan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi</li> </ul>
3. Pengaman bantaran dan tanggul sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai</li> <li>• Pengelolaan data stasiun curah hujan serta peralatan pemantau banjir</li> </ul>
<b>Mewujudkan Sistem Jaringan Jalan untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Barang dan Jasa Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi</b>	
1. Meningkatkan kualitas Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan</li> </ul>
2. Menjaga kapasitas layanan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</li> </ul>
3. Identifikasi prioritas penanganan Jaringan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan dan Perencanaan Ruas Jalan Kewenangan Pemerintah Provinsi</li> </ul>
<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>

<b>Melaksanakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Yang Aman, Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan</b>	
1. Mengidentifikasi kawasan strategis provinsi	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis provinsi
2. Menentukan skala prioritas penyusunan tata ruang kawasan strategis provinsi	Sosialisasi dan Sinkronisasi Program pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang
3. Melakukan sosialisasi tata ruang kawasan strategis provinsi	
<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
<b>Menciptakan Iklim Usaha Jasa Konstruksi Yang Kondusif dan Kompetitif</b>	
1. Menciptakan regulasi Perijinan	Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang – undangan jasa konstruksi
2. Menyamakan Persepsi tentang peran, tugas dan tanggungjawab	Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Badan Usaha, Orang Perorangan dan Instansi
3. Meningkatkan pemahaman akan bidang jasa konstruksi	Membina Kemitraan antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi
<b>Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi Yang Profesional dan Memadai</b>	
1. Peningkatan Kompetensi Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimtek dan sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah</li> <li>• Pelatihan dan sertifikasi pelaksana Pekerjaan Konstruksi</li> <li>• Pelatihan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi</li> <li>• Pelatihan perencanaan Pekerjaan</li> </ul>
<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
<b>Mengoptimalkan Peranan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Penyedia Jasa</b>	
1. Mendorong peningkatan pertumbuhan jasa konstruksi yang sehat dan memadai melalui penguatan aparatur Unit Sertifikat Badan Usaha (USBU) LPJK	Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan jasa konstruksi (SIKI dan SIPJAKI)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan jasa konstruksi	Memberikan akreditasi kepada asosiasi profesi dan institute pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi
<b>Melakukan Penyusunan Program, Evaluasi Dan Pengendalian Yang Berorientasi Pada Prioritas Dan Keseimbangan Wilayah</b>	
1. Pendataan dan identifikasi Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Penyediaan Data dan Informasi Kebutuhan pembangunan bidang infrastruktur

2.	Sinkronisasi Rencana dan Capaian Pembangunan Infrastruktur antara Pusat dan Daerah maupun lintas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi
3.	Evaluasi pelaksanaan program /kegiatan	Monitoring Pelaksanaan program / Kegiatan
4.	Pengendalian pelaksanaan program / kegiatan	Koordinasi pelaksanaan program/kegiatan dalam lingkup Dinas PU
<b>Meningkatkan Keandalan Bangunan Melalui Uji Mutu dengan Memanfaatkan Teknologi Sesuai Norma, Standar, Pedoman dan Manual</b>		
1.	Perancangan dan pengendalian kualitas infrastruktur PU yang tepat waktu dan tepat aturan	Sertifikasi dan akreditasi laboratorium pengujian
2.	Pemeliharaan sarana prasarana laboratorium dan penyediaan peralatan laboratorium pengujian	Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Laboratorium dan Pengadaan/ Pemeliharaan peralatan dan bahan pengujian
<b>Meningkatkan Pengelolaan Peralatan Dan Perbengkelan</b>		
1.	Pemeliharaan rutin Sarana dan prasarana peralatan berat Dinas Pekerjaan Umum	• Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung Bengkel / Workshop Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT
2.	Pemeliharaan / Rekondisi alat berat Dinas Pekerjaan Umum	• Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat
<b>STRATEGI</b>		<b>KEBIJAKAN</b>
<b>Meningkatkan Kemampuan dan Ketrampilan Sumber Daya Manusia Aparatur</b>		
1.	Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>• Pelatihan teknisi laboratorium pengujian</li> <li>• Pelatihan Sistem Informasi Berbasis Elektronik</li> <li>• Pelatihan bagi teknisi peralatan</li> </ul>
<b>Melakukan Tindakan Perbaikan Infrastruktur Dalam Rangka Tanggap Darurat Bencana</b>		
1.	Melakukan tindakan cepat tepat dan sesuai prosedur pada saat terjadi bencana	Pelaksanaan kegiatan penanganan tanggap darurat bencana

## **2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018**

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, Rencana Kerja Tahunan, IKU, dan anggaran / DPA Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penetapan Kinerja (PK) tahun 2018 Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan dibawah ini :



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. ANDREAS W. KOREH, MT  
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI NTT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DRS. FRANS LEBU RAYA  
Jabatan : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Februari 2018

Pihak Kedua  
  
DRS. FRANS LEBU RAYA

Pihak Pertama  
  
Ir. ANDREAS W. KOREH, MT



**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018**  
**PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI NTT**

**TAHUN ANGGARAN : 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air	Peningkatan Jaringan Irigasi DA pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	12 Daerah Irigasi, 3 Paket Perencanaan
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Kecil	3 Paket Pemeliharaan, 6 Paket Perencanaan
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi	30 Daerah Irigasi, 9 Paket Perencanaan
		Terlaksananya Pembangunan Embung Kecil	16 Buah Embung Kecil, 6 Paket Perencanaan
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kawasan Kabupaten / Kota	1 Kawasan
		Terpeliharanya Bantaran dan tanggul sungai dan tersedianya data base sungai pada daerah irigasi kewenangan provinsi Terpeliharanya Bantaran dan tanggul sungai dan tersedianya data base sungai pada daerah irigasi kewenangan provinsi	3 Paket pemeliharaan, 3 Paket Perencanaan
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa	1. Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan	
		a. Pembangunan / Peningkatan Jalan	Jalan Provinsi sepanjang 24,40 (HRB) dan 15,00 Km (GO)
		b. Pembangunan Jembatan	Jembatan sepanjang 65,00 M
		c. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan dengan DAK Infrastruktur Jalan	Pemb./ Rehab./ Pemeliharaan DAK untuk Jalan Provinsi sepanjang 6,10 Km
		d. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	3 Paket
		e. Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan	11 Paket

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
		2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
		a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan	6 Paket
		b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jembatan	3 Paket
		c. Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	5 Paket
		d. Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	3 Paket
3	Tersusun dan tercapainya RDTK di Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Rancangan Perencanaan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	2 RTR
4	Meningkatnya Profesionalisme Badan Usaha (Konstruksi)	a. Pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran	s/d 100%
		b. Pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran	s/d 100%

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi / Peningkatan Jaringan Irigasi	21.533.591.200
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Kecil	5.580.050.000
3	Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi SDA/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi	9.405.096.000
4	Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi SDA/ Terlaksananya Pembangunan Embung Kecil	22.571.400.000
5	Pengelolaan Sumber Daya Air/ Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kawasan Kabupaten / Kota	3.750.000.000
6	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah, Bantaran Sungai dan Pengendalian Banjir	4.102.696.800
7	Pembangunan Jalan dan Jembatan / Pembangunan Jalan dan Jembatan	166.672.648.000
8	Pembangunan Jalan dan Jembatan/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	19.624.770.000
5	Terwujudnya Rancangan Perencanaan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	3.042.481.000

10	Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum / Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	440,812,000
11	Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum / Peningkatan Pelayanan Jasa Kontrolasi dan Laboratorium Pengujian	2,077,730,000
<b>JUMLAH</b>		<b>258,801,275,000</b>

Kupang, Februari 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
 DRS. FRANS LEBU RAYA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI

  
 H. ANDREAS W. KOREH, MT

## 2.3 RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 298.499.470.900,- dengan rincian **Belanja Tidak Langsung Rp 22.634.737.000,-** dan **Belanja Langsung Rp. 275.864.733.900,-**.

Jumlah anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3  
Target anggaran Belanja Dinas PUPR Prov. NTT  
Tahun 2018

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 22.634.737.000,-	100%
Belanja Langsung	Rp. 275.864.733.900,-	100%
Jumlah	Rp. 298.499.470.900,-	100%

## 2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG

Peranan teknologi informasi pada aktifitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kehidupan manusia. Berkat teknologi, berbagai kemudahan dapat dirasakan manusia. Begitu pula dewasa ini dengan perkembangan perusahaan atau perkantoran yang semakin maju dan pesat maka permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks misalnya kurang cepatnya sistem pelayanan dan kebutuhan informasi, membuat orang berfikir untuk mencari cara mengatasi masalah tersebut misalnya dengan cara mengganti sistem manual menjadi sistem terkomputer.

Untuk mendukung komunikasi dalam penyampaian data dan informasi, Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun sistem informasi manajemen berbasis WEB yang dikenal dengan e-monitoring. Melalui e-monitoring tersebut penyampaian data dan informasi dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif. Selain itu dengan program ini perkembangan setiap paket pekerjaan dapat di monitor secara terus menerus, sehingga keterbukaan data yang di

sajikan oleh dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat di pantau baik oleh masyarakat maupun pihak lain.

Selain Aplikasi e-monitoring, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga memiliki aplikasi e-filing dan e-konstruksi. e-filing adalah aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang pemanfaatannya dilakukan untuk tujuan pengelolaan dan tindaklanjut surat menyurat dan penyampaian informasi secara online sehingga pelaksanaan dan tindaklanjut terhadap semua informasi surat menyurat dapat dilakukan lebih cepat dan tepat waktu.

Sedangkan untuk aplikasi e-konstruksi disiapkan untuk mengakomodir seluruh informasi tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sudah dan sedang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun berjalan. Aplikasi ini baru dikelola dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan terhadap kerangka data yang perlu dilengkapi dalam aplikasi ini sehingga dapat menyajikan informasi yang akurat tentang semua pekerjaan-pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

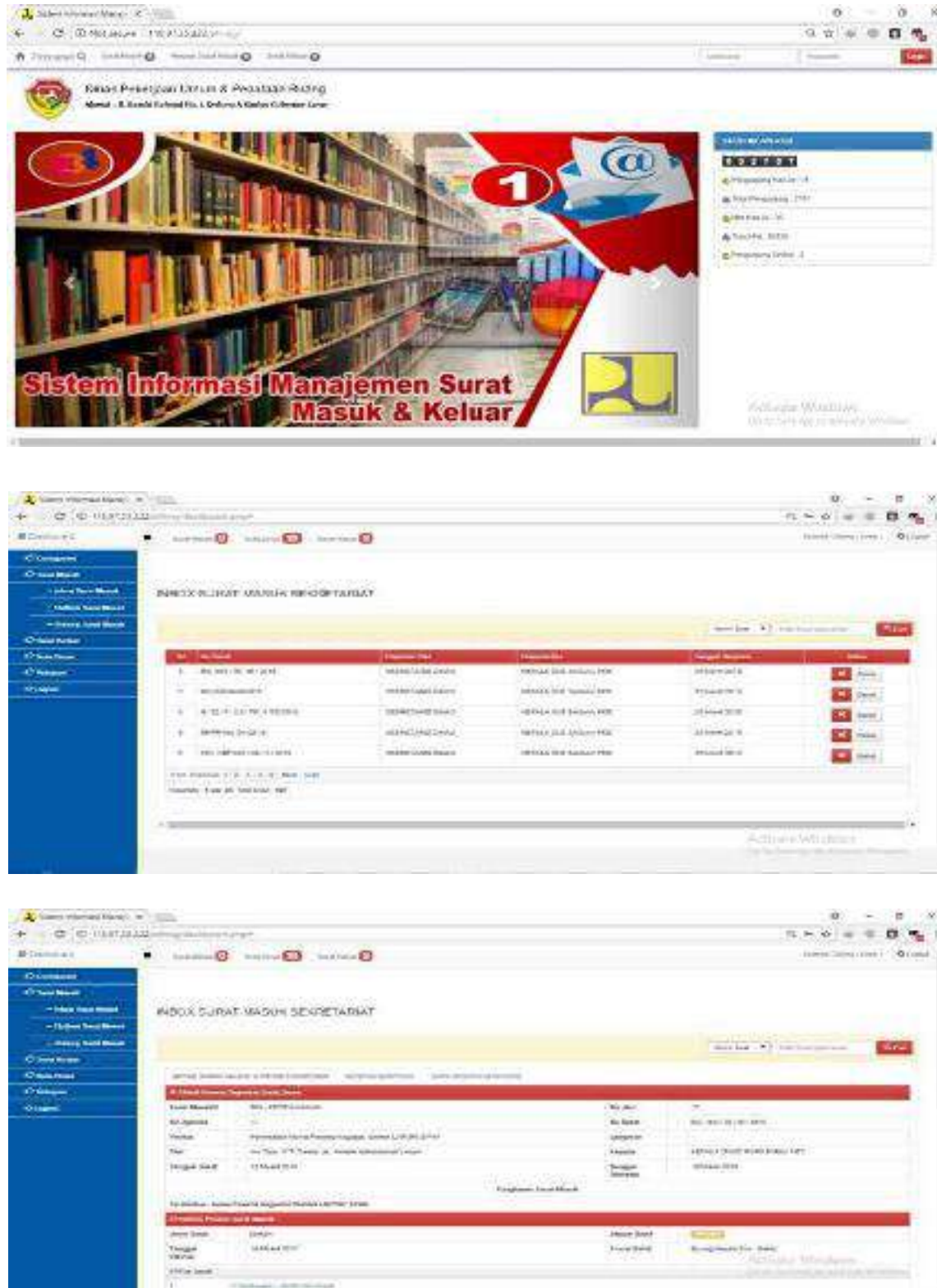
Gambar II.1  
Tampilan Aplikasi e-monitoring Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2018



Sumber : Dinas PUPR Prov NTT (<http://182.23.65.92/monitor.com/login.php>)



Gambar II.2  
Tampilan Aplikasi e-Filing Dinas Pupr Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018



Sumber : dinas pupr provinsi NTT (<http://118.97.35.222/efiling/dashboard.php#>)

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan Kinerja Dinas PUTR Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 digunakan sebagai acuan dalam melakukan Penilaian kinerja terhadap pelaksanaan semua program dan kegiatan Pembangunan infrastruktur di tahun Anggaran 2018. Penilaian ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja Dinas PUTR melalui data dan informasi tentang pelaksanaan program / kegiatan yang hasilnya akan memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data ini, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang dihasilkan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	85 % X	Sangat Berhasil	Hijau Tua
2.	70 % X < 85 %	Berhasil	Hijau Muda
3.	55 % X < 70 %	Cukup Berhasil	Kuning Tua
4.	X 55 %	Belum Berhasil	Merah

Keterangan : Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

#### 3.2 AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja dan program kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2018. Berikut evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis yang ada :



## SASARAN 1

### *Meningkatkan Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air*

Sasaran 1 ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan jumlah pasokan air pada saat musim hujan untuk memenuhi kebutuhan air pada masyarakat baik untuk kebutuhan sehari - hari maupun untuk pertanian khususnya pada saat musim kemarau tiba. Pencapaian sasaran 1 ini didukung oleh 2 Program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Tabel III.2

#### Sasaran Meningkatnya Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air

INDIKATO R	SAT UAN	2017	TH 2018			TARGET RENSTR A TAHUN - 5	TARGET RPJMD TAHUN - 5	2018	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA S/D TAHUN 2018 (%)
			TARG ET	REAL I SASI	CAPAIA N (%)				
Tersedianya air baku	Buah	136	20 em bung	22 em bung	110	2,70 %	2,70 %	756 *)	20,89
Tersedianya Sarana irigasi	Ha	53.097 **)	6.523,1 8	6.523,1 8	100	3,93 %	3 %	60.328	98,83
Rara-rata					105				

Ket : \*) Target Renstra 28% dari 2.700 buah embung.

\*\* ) jumlah luas jaringan s/d tahun 2017 di (+) jumlah jaringan tahun 2018 di (-) jumlah jaringan yang rusak

Sumber : DPA Dinas PU Prov NTT 2018, diolah,

Capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya air Baku

Ketersediaan air baku di dukung dengan adanya program/kegiatan pembangunan embung dimana pada tahun 2017 berdasarkan data dari Bidang Pembangunan SDA dan Irigasi jumlah embung terbangun 136 buah embung dan pada tahun 2018 pembangunan embung sebanyak 22 buah sehingga total sampai dengan 2018 menjadi 158 buah. Progres pencapaian terhadap target tahun 2018 berdasarkan target Renstra Dinas PU Provinsi NTT adalah sebesar 28 % dari 2700 (total kebutuhan) buah embung maka sampai dengan tahun 2018 pencapaian targetnya adalah sebesar 20,89 %.

Tabel III.3

**Pembangunan Embung pada tahun 2018**

No	Kab./Kota	Jumlah	Jumlah Dana	Nilai Kontrak	Realisasi
1	Kab. Kupang	2 Buah	2.133.720.000	2.133.720.000	2.133.720.000
2	Kab. TTS	2 Buah	2.166.260.000	2.166.260.000	2.166.260.000
3	Kab. TTU	2 Buah	2.090.540.000	2.090.540.000	2.090.540.000
4	Kab. Malaka	2 Buah	2.161.320.000	2.161.320.000	2.161.320.000
5	Kab. Lembata	2 Buah	2.255.970.000	2.255.970.000	2.255.970.000
6	Kab. Ngada	2 Buah	2.400.000.000	2.033.497.000	2.033.497.000
7	Kab. Nagekeo	2 Buah	2.400.000.000	2.159.690.000	2.159.690.000
8	Kab. Sumba Timur	2 Buah	2.400.000.000	2.188.047.000	2.188.047.000
9	Kab. Sumba Barat (DPAL)	2 Buah	953.585.050	953.585.050	953.585.050
10	Kab. TTS	2 Buah	2.400.000.000	2.103.030.000	2.103.030.000
11	Kab. Belu	2 Buah	2.400.000.000	2.281.150.000	2.281.150.000

Sumber : Data Bidang SDA-I 2018, Diolah

Total anggaran adalah Rp. 27.420.858.050.- dengan Realisasi Keuangan Rp. 25.710.207.801 (93,76 %) dan Realisasi fisik (98,18 %), Target Renstra Tahun ke 5 adalah 2,70 % dan Target RPJMD tahun ke 5 adalah 2,70 %.

Penyediaan sarana irigasi di dukung dengan program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Pada target Renstra Tahun ke 5 adalah 3,04 % dan Target RPJMD Tahun ke 5 adalah 3 %. Progres pencapaian terhadap target tahun 2018 berdasarkan target Renstra Dinas PU Provinsi NTT adalah jaringan irigasi dalam kondisi baik < 70 %.

Di tahun 2018 juga telah dilakukan Rehab/Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana seluas 18.481 Ha dengan Total anggaran 9.579.021.000.- dengan Realisasi Keuangan Rp. 8.745.434.294 (91,30 %) dan Realisasi Fisik (92,54 %).

Tabel III.4

**Peningkatan Jaringan Irigasi (Rehab/Peningkatan jaringan irigasi sederhana) pada Tahun 2018**

No	Kab./Kota	Nama Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Luas Penanganan	Jumlah Dana	Nilai Kontrak	Realisasi
1	Kab. Malaka	D.I. Weliman (DAK fisik)	1.000 Ha	722,26 Ha	950.000.000	838.787.000	838.787.000
2	Kab. Manggarai Timur	D.I. Wae Mokel I, II (DAK fisik)	1.007 Ha	587,52 Ha	950.000.000	831.714.000	831.714.000
3	Kab. Ngada	D.I. Malatawa (DAK fisik)	1.344 Ha	182,82 Ha	950.000.000	853.880.000	853.880.000
4	Kab. Sumba Barat	D.I. Loli (DAK fisik)	2.390 Ha	1.191,52 Ha	919.186.000	891.495.000	891.495.000
5	Kab. Sumba Barat	D.I. Wanokaka (DAK fisik)	2.653 Ha	890,50 Ha	950.000.000	918.515.000	918.515.000
6	Kab. Rote Ndao	D.I. Manubulu (DAU)	1.250 Ha	427,50 Ha	783.900.000	685.000.000	685.000.000
7	Kab. Manggarai Barat	D.I. Wae Ganggang (DAU)	1.281 Ha	317,13 Ha	1.000.000.000	907.621.000	907.621.000
8	Kab. Manggarai	D.I. Cancar (DAU)	2.500 Ha	885,20 Ha	1.000.000.000	898.626.000	898.626.000
9	Kab. Manggarai	D.I. Satar Lenda (DAU)	1.525 Ha	493,40 Ha	800.000.000	772.230.000	772.230.000
10	Kab. Manggarai Barat	D.I. Wae Paku (Hibah/Loan)	1.050 Ha	254 Ha	5.000.000.000	4.841.852.000	2.085.990.050
11	Sda	D.I. Wae Ganggang (Hibah/Loan)	1.281 Ha	317,13 Ha	750.000.000	725.558.000	725.558.000
12	Sda	D.I. Wae Racang (Hibah/Loan)	1.200 Ha	254,20 Ha	500.000.000	464.362.000	464.362.000
<b>TOTAL</b>			<b>18.481 Ha</b>	<b>6.523,18 Ha</b>			

Sumber : Data RTI Bidang SDA-I 2018, Diolah

Total luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi adalah seluas 60.328 Ha (42 D.I). Daerah Irigasi dalam kondisi baik berdasarkan hasil survey terbaru Bidang Pembangunan SDA dan Irigasi seluas 29.041,78 Ha, sedangkan sampai dengan tahun 2018 total Daerah Irigasi dengan kondisi rusak sedang dan berat seluas 31.286,30 Ha. Target peningkatan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Provinsi pada tahun 2018 adalah 12 D I, dan realisasinya adalah 12 D I

Proyeksi capaian sasaran yang optimal sampai dengan tahun 2018 dari pelaksanaan Peningkatan Jaringan Irigasi adalah =  $53.097 \text{ Ha} + 6.523,18 \text{ Ha} = 59.620,18 \text{ Ha}$ , sehingga proyeksi terhadap target tahun 2018 adalah  $59.620,18 \text{ Ha} / 60.328 \text{ Ha} \times 100 \% = 98,83 \%$ .

Dari pelaksanaan program / kegiatan ini dapat disampaikan :

**Out put** : Jaringan Irigasi pada 22 Daerah Irigasi dan Embung terbangun sebanyak 22 buah yang telah ditingkatkan dan dioptimalkan pemanfaatannya dan tersebar di beberapa Kabupaten di Nusa Tenggara Timur

**Outcome** : Lahan Irigasi / DI yang terbangun pada tahun 2018 seluas 18.841 Ha dan yang dalam kondisi baik seluas 6.523,18 Ha yang mendukung peningkatan fungsi jaringan irigasi dan ketersediaan air yang semakin meningkat, yang terbangun pada 7 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur

**Benefit** : Peningkatan fungsi bangunan pengairan (Embung) dan jaringan irigasi yang telah dikerjakan/dibangun pada beberapa Kabupaten secara lebih optimal.

**Impact** : Secara ekonomis ketersediaan air dan peningkatan fungsi jaringan irigasi memberikan manfaat pada peningkatan produksi pertanian yang kemudian dapat menopang para petani guna meningkatkan perekonomian mereka.

**Kendala :**

- Semakin terbatasnya Sumber Daya Manusia Bidang SDA dan Irigasi yang punya kemampuan di bidang SDA dan Irigasi disamping itu juga terbatasnya pegawai yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa untuk menyelenggarakan kegiatan bidang SDA dan Irigasi yang semakin besar dan kompleks.
- Akibat terbatasnya jumlah pegawai yang ada maka dalam pelaksanaan tugas bidang SDA dan Irigasi masih terjadi tumpang tindih dan rangkap tugas dengan pekerjaan-pekerjaan yang didanai APBD, APBN dan Tugas Pembantuan.

- Kondisi , kemampuan, kapasitas serta profesionalisme mitra kerja bidang jasa konstruksi masih kurang sehingga berakibat pada hasil-hasil pembangunan yang kualitasnya masih substandard dan tidak mencapai umur rencana.

**Solusi / Pemecahan Masalah :**

- Pelaksanaan pembangunan bidang SDA dan Irigasi pada Tahun Anggaran 2018 khususnya pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan lebih awal.
- Peningkatan kualitas SDM bidang SDA dan Irigasi akan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada semua pegawai untuk mengikuti pendidikan formal (pendidikan jenjang D3, D4 dan S2) maupun pendidikan non formal (Pelatihan pengadaan barang dan jasa serta perencanaan).
- Akan dilakukan penataan pegawai yang ada sehingga pembagian tugas dapat merata dan adil sesuai dengan kompetensi, tingkat pendidikan, kepangkatan dan keterampilan dan selanjutnya diharapkan pembinaan pegawai dapat berjalan dengan baik.
- Untuk peningkatan mutu dan kemampuan profesionalisme mitra kerja maka diharapkan agar perlu dilakukan pembinaan jasa konstruksi melalui sosialisasi dan pelatihan.

**SASARAN 2**

***Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mobilitas Barang Dan Jasa***

Sasaran 2 ini diarahkan untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses transportasi dalam mendukung kegiatan sehari – hari mereka. Sasaran 2 ini didukung oleh 2 program diantaranya tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap.

Tabel III.5

**Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mobilitas Barang Dan Jasa**

INDIKATO R	SAT UAN	2017	TH 2018			TARGET RENSTRA TAHUN – 5	TARGET RPJMD TAHUN – 5	2018	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA S/D TAHUN 2018 (%)
			TAR GET	REALI SASI	CAPAIA N (%)				
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi baik	Km	1.669,5	55,98	49,5	88,42	15 %	15 %	2.650	64,86
Persentase jembatan provinsi dalam kondisi baik	M	4.412,20	65	85	130,76	15 %	15 %	9,673 .55	46,48
Rara-rata					109,59				

Sumber : DPA Dinas PU Prov NTT 2018, diolah

Capaian dari indikator di atas adalah sebagai berikut :

**Panjang Jalan dan jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik** dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan jumlah kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meningkat pula. Target Renstra pada tahun ke 5 adalah 15 % dan target RPJMD tahun ke 5 adalah 15 %.

Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik mengalami perkembangan setiap tahunnya, sejalan dengan jumlah kebutuhan dan aktifitas pengguna jalan yang semakin meningkat akan kebutuhan fasilitas umum di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terus meningkat pula, dan disisi lain juga kondisi jalan yang baik sangat dipengaruhi oleh aspek pemanfaatan setiap tahunnya yang dapat mengakibatkan adanya penurunan kondisi jalan.

Sesuai dengan data kondisi jalan Bidang Bina Marga sampai dengan tahun 2018, disampaikan kondisi sebagai berikut :

- Panjang Jalan Provinsi pada tahun 2017 adalah 2.650 Km ( SK Status Jalan terbaru No.256/KEP/HK/2017).
- Jalan dalam kondisi baik (eksisting) sesuai data kondisi jalan per April 2018 adalah sepanjang 1669,5 Km (63% dari total panjang jalan provinsi).
- Di tahun 2018 dilakukan pembangunan/peningkatan kondisi jalan sepanjang 55,98 km dengan realisasi capaian sepanjang 49,5 km.
- **Akumulasi capaian indikator** Jalan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2018 terhadap akhir tahun capaian (**tahun 2018**) adalah sebesar **64,86 % dari total panjang jalan Provinsi (1.719 / 2.650 x 100)**.

Tabel III.6

**Peningkatan Jalan yang dikerjakan pada tahun 2018**

No	Kab.Kota	Nama Ruas	Volume/Satuan	Jumlah Dana	Nilai Kontrak	Realisasi
1	Kota Kupang	073. Jl. W.J. Lamentik	0.50 Km	7.033.424.000	7.033.424.000	7.033.424.000
2	Kab. Kupang	- 099, 101.Oelmasi-Barate-Manubelon	1.00 Km HRS, 2.00 Km GO	4.826.525.000	4.826.525.000	4.826.525.000
		-134 Burain-Baun	1.00 Km	3.577.708.000	3.577.708.000	3.577.708.000
3	Kab. TTS	- 131 Oenlasi-Boking	1.00 Km HRS, 2.00 Km GO	4.907.789.000	4.907.789.000	4.907.789.000
		- 167 Kapan-Nenas	1.00 Km HRS, 2.00 Km GO	4.960.913.000	4.960.913.000	4.960.913.000
		- 093.1 Kapan – Bts	1.00 Km	3.469.641.000	3.469.641.000	3.469.641.000
		Kab. TTU				
4	Kab. Alor	090 Kalabahi- Kokar	1.00 Km	3.710.000.000	3.710.000.000	3.710.000.000
5	Kab. Lembata	175 lauring-Wairiang	1.00 Km	3.655.123.000	3.655.123.000	3.655.123.000
6	Kab. Flores Timur	- 117 Rita Ebang-Podor-Lamakera	1,00 Km	3.648.811.000	3.648.811.000	3.648.811.000
		- 122 Mudajebak ( Bts Kab).-lato-wairunu	1,00 Km	3.701.792.000	3.701.792.000	3.701.792.000
		- Waiwerang-Sagu	1,00 Km	3.723.950.000	3.723.950.000	3.723.950.000

7	Kab. Sikka	122.1 Napung-Mali-Mudajebak (Bts Kab.)	1.00 Km	3.716.609.000	3.716.609.000	3.716.609.000
8	Kab. Ende	152 Kaburea-Maukaro-Nabe	1.00 Km	3.633.572.000	3.633.572.000	3.633.572.000
9	Kab. Ngada	- 092 Poma-Mboras - 160 Mbazang-Waepana	1.00 Km 1.00 Km	3.720.720.000 3.725.750.000	3.720.720.000 3.725.750.000	3.720.720.000 3.725.750.000
10	Kab. Nagekeo	151 Aeramo-Kaburea	1.00 Km HRS, 2.00 Km GO	5.124.471.000	5.124.471.000	5.124.471.000
11	Kab. Manggarai Timur	161 Bealaing-Mukun-Mbazang	1.00 Km HRS, 4.00 Km GO	6.404.490.000	6.404.490.000	6.404.490.000
12	Kab. Manggarai	095.1 Sp.Cumbi-Golo Cala-Iteng	1.00 Km	3.677.240.000	3.677.240.000	3.677.240.000
13	Kab. Manggarai Barat	171 Sp. Nggorang-Sp.Wangkung-Kondo	1.00 Km HRS, 2.00 Km GO	5.166.315.000	5.166.315.000	5.166.315.000
14	Kab. Sumba Timur	-053.1 Melolo-kananggar -139 Malahar-Sp. Tarimbang-Praipaha - 138 Nggongi-Wahang-Malahar-Sp.Tarimbang	1.00 Km 1.00 Km 1,00 Km HRS, 2,00 Km GO.	3.654.695.000 3.711.696.000 4.932.140.000	3.654.695.000 3.711.696.000 4.932.140.000	3.654.695.000 3.711.696.000 4.932.140.000
15	Kab. Sumba Tengah	Mamboro-bts kab. Sumba Barat	1.00 Km	3.631.734.000	3.631.734.000	3.631.734.000
16	Kab. Sumba Barat	- Padedeweri-Wanokaka -Padedeweri-Padedewatu-Patjala -Patjala-bts kab. Sumba barat daya	1.00 Km 1.00 Km 0.90 Km	3.714.965.000 3.645.040.000 3.334.275.000	3.714.965.000 3.645.040.000 3.334.275.000	3.714.965.000 3.645.040.000 3.334.275.000
17	Kab. Sumba Barat Daya	(Radamata-Ketewer	1.00 Km	3.323.075.000	3.323.075.000	3.323.075.000
18	Kota Kupang	Jl W. J. Lamentik (DPAL)	1.00 Km	1.511.523.855	1.511.523.855	1.511.523.855
19	Kab. Kupang	101 Barate-	2,10 Km	7.826.280.000	7.532.946.000	7.532.946.000



		Manubelon-Naikliu (DAK)				
20	Kab. Flores Timur	114 Wailebe-Baniona-Waiwerang (DAK)	2.00 Km	7.453.600.000	7.356.048.000	7.356.048.000
21	Kab.Sumba Barat Daya	141 Gaura-Bondokodi (DAK)	2.00 Km	7.453.600.000	7.373.091.000	7.373.091.000

Sumber : Data Bidang Bina Marga 2018, Diolah

Tabel III.7

**Pembangunan Jembatan di tahun 2018**

No	Kab./Kota	Nama Jembatan	Volume/Satuan	Anggaran
1	Kab. Kupang	Jembatan Oelnaikbesi	25,00 M	5.224.888.000
2	Kab. Belu	Jembatan Aebeli	10 M	2.071.061.000
3	Kab. Ende	Jembatan Ropa	10 M	2.079.217.000
4	Kab. Sumba Timur	Jembatan Praibakul 5	20 M	4.268.060.000
5	Kab.Manggarai Barat	Jembatan Wae Mbek(DPAL)	20 M	519.746.950

Sumber : Data Bidang Bina Marga 2018, Diolah

Tabel III.8

**Penanganan Jalan dan Jembatan**

No	Kegiatan	Jenis Penanganan		Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	
		HRS	GO	DAU	DAK	DAU	DAK
1	Peningkatan Jalan	27,4 Km	16,00 Km	112.332.463.000	22.733.480.000	112.332.463.000	22.262.085.000
2	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	-	-	16.170.883.000	-	16.151.897.000	-
3	Pembangunan Jembatan	-	-	14.162.972.950	-	14.162.972.950	-

Sumber : Data Bidang Bina Marga 2018, Diolah

Peningkatan Jalan dengan dengan sumber dana DAU terdiri dari 27 paket, tersebar di 18 Kab./Kota Se-NTT. Panjang efektif penanganan jalan 27,4 Km HRS dan 16,00 Km Grading Operation (GO) dengan total anggaran Rp. 112.332.463.000,-, sedangkan dengan sumber dana DAK terdiri dari 3 paket, tersebar di 3 Kabupaten dengan panjang efektif 6,10 Km dengan total anggaran Rp. 22.733.480.000,-.

Pada tahun 2018 dilakukan kegiatan pembangunan jembatan dengan sumber dana DAU terdiri dari 5 paket sepanjang 85 M, yang tersebar di 5 Kabupaten dengan total anggaran Rp. 14.162.972.950.00,-,

Capaian Indikator Jembatan dalam Kondisi Baik sampai dengan tahun 2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

- Total Panjang Jembatan Provinsi sesuai hasil survey Bidang Bina Marga DInas Pekerjaan Umum Provinsi NTT adalah sepanjang 9.673,55 M (data survey kondisi jalan dan jembatan tahun 2017)
- Target penanganan dan pembangunan jembatan di tahun 2017 adalah sepanjang 85 M (sesuai rincian diatas)
- Jembatan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2017 adalah 4.412,20 M. sehingga sampai dengan tahun 2018 jembatan dalam kondisi baik mencapai 4.497,2 M.
- **Capaian kinerja** ditahun **2018** adalah **sebesar 130,76 %** (target 65 M dan realisasi 85 M)
- **Proyeksi capaian kinerja** pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan untuk pelayanan kepada masyarakat **sampai dengan tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2018** adalah  $4.497,2/9.673,55 \times 100 = 46,48 \%$ .

#### **Realisasi Anggaran**

- kegiatan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.644.164.000,-. Total nilai sesuai kontrak sebesar Rp. 6.581.966.000,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 100 %.
- Peningkatan Jalan dengan dengan sumber dana DAU terdiri dari 27 paket, tersebar di 18 Kab./Kota Se-NTT. dengan total anggaran Rp. 112.332.463.000,-, total nilai sesuai kontrak Rp. 112.332.463.000,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 100 %, sedangkan dengan sumber dana DAK terdiri dari 3 paket, tersebar di

3 Kabupaten dengan panjang efektif 6,10 Km dengan total anggaran Rp. 22.733.480.000,- total nilai sesuai kontrak Rp 22.262.085.000,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 100 %.

- Pembangunan jembatan dengan pagu anggaran Rp. 14.162.972.950,- dengan sumber dana DAU terdiri dari 5 paket tersebar di 5 Kabupaten dengan total nilai sesuai kontrak sebesar Rp. 14.162.972.950,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 100 %.

**Hasil (*outcome*)** penanganan Program Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Pembangunan Jalan dengan hasil Terjaminnya data usulan penanganan Pembangunan/ Peningkatan Jalan yang akurat sesuai kebutuhan lapangan guna meningkatkan fungsi layanan Ruas.
- 2) Peningkatan Jalan Provinsi dengan hasil dapat meningkatnya fungsi pelayanan ruas jalan Provinsi sepanjang 33,5 Km HRS dan 16,00 Km GO, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan wilayah, serta waktu tempuh rata-rata menjadi singkat.
- 3) Perencanaan Pembangunan Jembatan dengan hasil tersediannya Data Usulan Penanganan pembangunan/Penggantian jembatan yang akurat sesuai kebutuhan lapangan, guna meningkatkan fungsi layanan Ruas Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor, fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian jembatan.
- 4) Pembangunan Jembatan agar dapat memperlancar arus lalu lintas yang melewati penghalang/sungai pada Ruas Jalan Provinsi serta meningkatkan fungsi pelayanan jalan Nasional/Provinsi dan waktu tempuh menjadi singkat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah.
- 5) Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Jalan dengan hasil meningkatnya kelancaran lalu lintas, menurunkan waktu tempuh guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah Provinsi NTT.

- 6) Pemeliharaan Jembatan agar dapat mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi agar tetap dapat berfungsi sepanjang tahun dengan tingkat pelayanan yang maksimal.

### **Manfaat (*Benefit*)**

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penanganan Program Tahun Anggaran 2018 Bidang Bina Marga sebagai berikut :

- a) Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan bermanfaat terhadap kegiatan di tahun mendatang sebagai bahan informasi pelaksanaan program/kegiatan.
- b) Peningkatan Jalan dan Jembatan, Peningkatan/Rehabilitasi Jalan bermanfaat agar akses dan mobilitas orang dan barang menjadi lancar dan baik.
- c) Pengawasan Jalan dan Jembatan bermanfaat sebagai alat evaluasi dan pengendalian kualitas serta kuantitas pemanfaatannya sehingga akses dan mobilitas orang dan barang menjadi lancar dan baik.
- d) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan memberi manfaat agar lalu lintas barang dan jasa cukup lancar/tidak terputus, dan juga terhadap Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang semakin berkurang.

### **Dampak (*Impact*)**

Dampak dari pelaksanaan Program Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai Tahun Anggaran 2018 adalah secara umum memberi dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang makin stabil bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin lancarnya arus transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain.

Dari aspek perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan berdampak terhadap kelancaran proses penyusunan Program dan hasil kegiatan paket- paket fisik sesuai waktu, mutu, volume dan biaya yang tepat.

akhirnya seluruh program/kegiatan pembangunan jalan dan jembatan memberikan dampak peningkatan efisiensi serta efektif dalam penggunaan tenaga kerja secara profesional dalam penerapan teknologi bidang prasarana dan sarana Pekerjaan Umum serta pemanfaatan waktu dan peralatan yang sesuai dan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

## **MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG DIHADAPI**

- 1) Permasalahan utama yang dihadapi dalam penanganan jalan provinsi di Provinsi NTT adalah : ketersediaan anggaran untuk jalan provinsi setiap tahun tidak sebanding dengan laju kerusakan (penurunan kondisi) jalan yang terjadi.
- 2) Ruas jalan provinsi pada umumnya berada pada daerah perbukitan yang rawan longsor bila terjadi hujan secara terus-menerus dengan intensitas tinggi.
- 3) Terjadi peningkatan volume lalu lintas barang dan jasa serta bertambahnya kendaraan angkutan bertonase tinggi, menyebabkan kelebihan beban (over load) yang diterima jalan.
- 4) Kebiasaan penduduk setempat dalam pemanfaatan lahan seperti : perambahan hutan, ladang yang berpindah-pindah, pembakaran hutan, penambangan material galian C di daerah milik jalan yang terus menerus dilakukan memberi kontribusi terjadinya kerusakan jalan terlebih pada musim hujan.

## **Upaya Tindak Lanjut**

Upaya tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Mengadakan prioritas penanganan ruas-ruas jalan yang strategis untuk didanai dengan dana APBD Provinsi dan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten, agar Pemerintah Kabupaten ikut membantu menangani ruas-ruas jalan Provinsi di wilayahnya yang tidak terprogramkan melalui dana APBD Provinsi.

2. Melakukan sinkronisasi program dengan Kabupaten/Kota untuk memperoleh masukan kebutuhan infrastruktur yang sesuai untuk masing-masing Kabupaten/Kota serta penanganan yang tepat sesuai kewenangan yang ada.
3. Menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan lahan di sekitar jalan untuk kegiatan penambangan dan bertani dengan tanaman semusim pada daerah tebing dan lereng tanpa ijin.
4. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pembatasan muatan kendaraan yang melewati ruas jalan ( tidak melebihi daya dukung jalan sesuai aturan yang berlaku ).
5. mengadakan kursus-kursus dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bidang teknis, manajemen penyedia jasa dan pengguna jasa.
6. Koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.

### **SASARAN 3**

***Terlaksananya Penyusunan Program Serta Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang PU dan Penataan Ruang***

Indikator sasaran ini adalah tersedianya data dan informasi serta layanan kebutuhan pembangunan infrastruktur Bidang ke-PU-an di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT. Capaian Sasaran 3 ini dilakukan melalui pelaksanaan 2 Program Manajemen Tata Layanan Infrastruktur dengan kegiatan peningkatan pelayanan jasa konstruksi dan laboratorium pengujian dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu.

Tabel III.9  
**Sasaran Terlaksananya Penyusunan Program serta Evaluasi dan Pengendalian  
Program/Kegiatan Bidang PU dan Penataan Ruang**

INDIKATOR	SATUAN	2017	TH 2018			TARGET RENSTR A TAHUN – 5	TARGET RPJMD TAHUN - 5	2018	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA S/D TAHUN 2018 (%)
			TAR GET	REALI SASI	CAPAIA N (%)				
Meningkatnya pelayanan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Pengujian	Jumlah layanan	637	276	276	100	27,27 %	22,73 %	900	101,4
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Kab/Kota	22	22	22	100	20 %	20 %	22	100
Rara-rata					100				

Keterangan :

Sumber : data Dinas PU Prov NTT, diolah

a. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan Laboratorium Pengujian.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan jasa konstruksi dan laboratorium pengujian progres pencapaiannya diukur dari jumlah layanan yang diberikan, Target capaian layanan ini adalah sebesar 27,27 % (Renstra Dinas). Realisasi capaian layanan di tahun 2018 adalah sebesar 276 layanan dengan rincian sebagai berikut :

- Kelompok uji tanah sebanyak 49 sampel
- Kelompok uji agregat sebanyak 78 sampel
- Kelompok uji aspal sebanyak 43 sampel
- Kelompok uji mortar sebanyak 30 sampel
- Kelompok uji beton sebanyak 76 sampel

Total capaian layanan tahun 2018 yang dapat direalisasikan adalah sebesar 276 layanan. Target capaian layanan ini adalah sebesar 237,48 % atau sebesar Rp. 764.676.828,- dari target sebesar Rp. 322.000.000,-

Target dalam Renstra tahun ke 5 adalah 27,27 %, sedangkan target dalam RPJMD tahun ke 5 adalah 22,73 %. Progres capaian pelaksanaan kegiatan s/d Tahun 2018 adalah sebesar 101,4 %.

b. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan terpadu.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu sangat penting dan perlu dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan di lapangan sehingga kualitas dan kuantitas pekerjaan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberi manfaat bagi masyarakat banyak. Realisasi penyerapan anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 488.032.853,- atau sebesar 99,43 % dari pagu anggaran sebesar Rp.490.812.000,-. Target dalam Renstra tahun ke 5 adalah 20 %, sedangkan target dalam RPJMD tahun ke 5 adalah 20 %.

**Outcome (hasil) :**

- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat berat dan perbengkelan serta alat laboratorium yang lebih baik dan lebih lengkap untuk menunjang pelayanan pekerjaan konstruksi di lapangan dan juga pelayanan laboratorium yang semakin baik.
- Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan dengan kualitas dan kuantitas yang semakin baik.

**Benefit (manfaat) :**

Pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan pelayanan jasa konstruksi dan laboratorium pengujian ini memberi manfaat semakin meningkatnya pelayanan bagi pekerjaan konstruksi di lapangan dengan tambahan alat-alat berat dan juga alat-alat laboratorium pengujian. Demikian juga dari hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu telah mendorong terlaksananya pekerjaan dengan kualitas dan kuantitas yang semakin baik.



**Impact (dampak) :**

Dampak dari pelaksanaan semua kegiatan ini adalah semakin meningkatnya kualitas pekerjaan-pekerjaan konstruksi dilapangan dan pelayanan uji laboratorium pengujian terhadap material yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan, baik untuk infrastruktur jalan, jembatan maupun sarana irigasi dan sumber daya air lainnya.

Program dan kegiatan lain yang ikut menunjang pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pelayanan administrasi umum yang tertuang dalam Program / Kegiatan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung anggaran sebesar Rp.3.084.651.400,- dan realisasi penyerapan sebesar Rp.2.935.374.602,- atau sebesar 95,16 %.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur didukung anggaran sebesar Rp. 2.940.850.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 2.745.094.226,- atau sebesar 93,34 %.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.81.720.000,- dengan penyerapan sebesar Rp.81.693.010 atau sebesar 99,97 %.

**3.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp.265.538.899.449,- dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.275.864.733.900,- atau sebesar **96,26 %**.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.10

**Realisasi Anggaran Belanja Langsung  
Dinas PU Provinsi NTT  
Tahun 2018**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Meningkatnya Konservasi dan pendayagunaan Sumber Daya Air</i>	Tersedianya air baku	Buah	<b>Pengelolaan Sumber Daya Air/</b> Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi embung	5.561.372.000,-	5.442.683.882,-	97,87
		Buah	<b>Pengelolaan Sumber Daya Air/</b> Pembangunan embung kecil	27.420.858.050,-	25.710.207.801,-	93,76
		<b>Sub Total</b>		<b>32.982.230.050,-</b>	<b>31.152.891.683,-</b>	<b>94,45</b>
	Tersedianya Sarana Irigasi	Ha	<b>Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi/</b> Peningkatan Jaringan Irigasi	21.493.629.200,-	17.003.412.097,-	79,11
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi	9.579.021.000,-	8.745.434.294,-	91,30
		<b>Sub Total</b>		<b>31.072.650.200,-</b>	<b>25.748.846.391,-</b>	<b>82,85</b>
	<b>Total 1</b>			<b>64.054.880.250,-</b>	<b>56.901.738.074,-</b>	<b>88,83</b>

Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa	Prosentase Panjang Jalan /Jembatan Provinsi dalam kondisi baik	Km / M	Pembangunan Jalan dan Jembatan/ Pembangunan jalan dan jembatan	168.359.716.870,-	166.834.064.530,-	99,09
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembata	23.064.288.000,-	22.639.587.946,-	98,16
		Total 2		191.424.004.870,-	189.473.652.476,-	98,98
Terlaksananya penyusunan program serta evaluasi dan pengendalian program/kegiatan bidang PU dan Penataan Ruang	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi dan laboratorium pengujian	Jumlah layanan	Peningkatan pelayanan jasa konstruksi dan laboratorium pengujian	2.196.666.900,-	2.169.195.882,-,-	98,75
	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi dan laboratorium pengujian	Kab./Kota	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Terpadu	490.812.000,-	488.032.853,-	99,43
		Total 3		2.687.478.900,-	2.657.228.735,-	98,87
		Total 1+2+3		258.166.364.020,-	249.032.619.285,-	96,46

Sumber data : Dinas PU Prov NTT Th. 2018

Dari tabel di atas terdapat 3 sasaran strategis dengan 6 Indikator yang terbagi ke dalam 8 Program kegiatan. Pencapaian target dari 6 Indikator ini dalam **tahun 2018** secara rata-rata adalah sebesar **96,46 %**. Hal ini memberikan gambaran bahwa untuk pencapaian yang lebih maksimal dibutuhkan dukungan dan kerja sama semua pihak terkait serta juga dukungan dan ketersediaan dana yang memadai.

Tabel III.11  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran**  
**Dinas PU Provinsi NTT**  
**Tahun 2018**

<i>SASARAN</i>	<i>TARGET (Rp)</i>	<i>REALISASI (Rp)</i>	<i>PROSENTAS E</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<b>1. Meningkatnya Konservasi dan pendayagunaan Sumber Daya Air</b>	<b>64.054.880.250,-</b>	<b>56.901.738.074,-</b>	<b>88,83</b>
<b>2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas barang dan jasa</b>	<b>191.424.004.870 ,-</b>	<b>189.473.652.476,-</b>	<b>98,98</b>
<b>3. Terlaksananya penyusunan program serta evaluasi dan pengendalian program/kegiatan bidang PU dan Penataan Ruang</b>	<b>2.687.478.900,-</b>	<b>2.657.228.735,-</b>	<b>98,87</b>
<b>Total</b>	<b>258.166.364.020 ,-</b>	<b>249.032.619.285,-</b>	<b>96,46</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 6 (enam) indikator Penyelenggaraan kegiatan, yang terbagi lagi ke dalam 8 program /kegiatan. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2018 ini merupakan tahun ke 5 (ke lima) dari Rencana strategis Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2018.

Keberhasilan yang dicapai dalam penyerapan keuangan secara keseluruhan pada tahun 2018 adalah sebesar 96.26%, dan untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung dengan kerja yang lebih keras lagi dari semua pihak yang terkait didalamnya.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan Capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 3 (tiga) sasaran, terdapat 6 (enam) indikator kinerja sasaran dengan 8 (delapan) program kegiatan yang dipilih sebagai tolak ukur kinerja Dinas. **Pada tahun 2018**, dari 6 (enam) indikator sebagai tolak ukur tingkat capaian rata-rata adalah **sebesar 96,46 %**. Dan diperlukan upaya dengan kerja keras dan dukungan dana untuk bisa mencapai

target 100 %.

3. Untuk mendukung penyusunan LKIP yang lebih baik, disarankan agar Perlu dicermati kembali kesesuaian penentuan Sasaran dan Indikator kinerja dengan program dan kegiatan yang diusulkan sehingga dalam evaluasi dapat dilakukan penilaian secara tepat terhadap indikator yang telah ditetapkan tersebut.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTT tahun anggaran 2018 ini dibuat dan diharapkan dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. LAMPIRAN 1 : RENCANA STRATEJIK TAHUN 2014 – 2018
2. LAMPIRAN 2 : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PUPR PROV. NTT
3. LAMPIRAN 3 : RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS PUPR PROV. NTT T.A. 2018
4. LAMPIRAN 4 : PENETAPAN KINERJA DINAS PUPR PROV. NTT TRIWULAN IV

**RENCANA STRATEJIK**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2014 - 2018**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1 Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Air Baku	1 Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Air	- Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari		1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Meningkatnya luas wilayah pertanian yang mendapat pelayanan air irigasi dan serta pemenuhan kebutuhan air baku	20 % dari kebutuhan 2700 unit		26.500		36.123		50.379		64.748		83.073	28 % dari kebutuhan 2700 unit	260.823	Bidang SDA-I			
					- Pembangunan Embung kecil	- Terbangunnya embung kecil	0,37	10.000	0,98	26.498	1,50	40.623	2,03	54.854	2,70	73.034	8	205.009			22 Kab/ Kota	
					- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Embung kecil	- Terpeliharanya embung kecil yang telah dibangun		2.500		2.625		2.756		2.894		3.039	-	13.814			22 Kab/ Kota	
					- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air (WISMP)	Tersedianya Laporan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan SDA dan Komisi Irigasi		14.000		5.000		5.000		5.000		5.000	-	34.000			22 Kab/ Kota	
					- Study perencanaan embung kecil	Tersedianya data perencanaan embung		-		2.000		2.000		2.000		2.000	-	8.000			22 Kab/ Kota	
1 Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Air Baku	2 Meningkatnya Pendayagunaan Sumber Daya Air	- Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem jaringan irigasi yang telah ada		1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Meningkatnya luas wilayah pertanian yang mendapat pelayanan air irigasi dan serta pemenuhan kebutuhan air baku	Jaringan Irigasi dalam kondisi baik <70%		42.486		45.360		47.591		52.615		57.890	Jaringan Irigasi dalam kondisi baik >70%	245.942	Bidang SDA-I			
					- Peningkatan Jaringan Irigasi	- terbangunnya jaringan irigasi	2,18	31.068	2,29	32.621	2,40	34.252	2,71	38.647	3,04	43.261	12,62	179.850			22 Kab/ Kota	
					- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	- Terpeliharanya jaringan irigasi yang telah dibangun	8,77	5.000	9,21	5.250	9,67	5.513	10,15	5.788	10,66	6.078	48,47	27.628			22 Kab/ Kota	
					- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	- Teroptimalisasinya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun		900		945		992		1.042		1.094	-	4.973			22 Kab/ Kota	
					- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	- Terpeliharanya jaringan irigasi air tanah yang telah dibangun		5.020		5.271		5.535		5.811		6.102	-	27.739			22 Kab/ Kota	
					- Studi Identifikasi AKNOP (Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan)	- tersedianya data kerusakan jaringan irigasi		498		523		549		576		605	-	2.752			22 Kab/ Kota	
					- Studi identifikasi kerusakan jaringan irigasi dan embung	- tersedianya data perencanaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi		-		750		750		750		750	-	3.000			22 Kab/ Kota	
1 Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Air Baku	3 Menurunnya tingkat kerusakan bantaran dan tanggul sungai	- Berkurangnya daya rusak air pada bantaran dan tanggul sungai (Kewenangan Provinsi 15 DAS)		1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Meningkatnya luas wilayah pertanian yang mendapat pelayanan air irigasi dan serta pemenuhan kebutuhan air baku			4.000		5.200		5.635		5.856		6.087		26.778	Bidang SDA-I			
					- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	- Terpeliharanya bantara dan tanggul sungai	Kewenangan Provinsi 15 DAS	20	4.000	20	4.200	20	4.410	20	4.631	20	4.862	100			22.103	22 Kab/ Kota
					- Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengendali Banjir	- Terpasangnya peralatan pemantau banjir dan tersedianya data curah hujan dan muka air banjir		-	6,0	1.000	8,0	1.225	8,0	1.225	8,0	1.225	30,0	4.675				



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa	1. Meningkatkan persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	- Tersedianya jalan dan jembatan yang mantap untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam kabupaten/ kota		1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Provinsi	Peningkatan jalan provinsi 1.314 km dengan presentasi 35% baik		221.595		243.755		280.318		322.365		370.720	100%	1.438.753	Bidang Bina Marga	22 Kab/ Kota 22 Kab/ Kota 22 Kab/ Kota 22 Kab/ Kota 22 Kab/ Kota 22 Kab/ Kota
					- Pembangunan Jalan dan Jembatan	- terbangunnya jalan dan jembatan	10%	125.763	10%	138.339	15%	159.090	15%	182.954	15%	210.397	65%	816.543		
					- Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Jembatan	- tersedianya data perencanaan rehab/ pemel jalan dan jembatan	10%	3.500	10%	3.850	15%	4.428	15%	5.092	15%	5.855	65%	22.724		
					- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- terpeliharanya jalan dan jembatan kewenangan provinsi	10%	50.678	10%	55.746	15%	64.108	15%	73.724	15%	84.782	65%	329.038		
					- Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	- tersedianya data perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	10%	5.500	10%	6.050	15%	6.958	15%	8.001	15%	9.201	65%	35.710		
					- Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan	- terbangunnya dan terpeliharanya jalan dan jembatan	10%	35.154	10%	38.669	15%	44.470	15%	51.140	15%	58.811	65%	228.245		
					- Survey kondisi jalan dan jembatan kewenangan provinsi	- tersedianya data kondisi jalan dan jembatan kewenangan provinsi	10%	1.000	10%	1.100	15%	1.265	15%	1.455	15%	1.673	65%	6.493		
3. Meningkatnya permukiman yang berkualitas dan produktif	1. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat	- Tersedianya akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum 60 Ltr/Org/Hr		1. Program Pengelolaan Sumber Air	Meningkatnya proporsi masyarakat yg mendapat pelayanan air bersih	Cakupan Pelayanan Air Bersih 50,34 %		9.271		9.827		10.417		11.042		11.704	55,34%	52.261	Bidang Cipta Karya	22 Kab/ Kota 22 Kab/ Kota Kota Kupang dan Kab. "
					- identifikasi cakupan pelayanan air minum provinsi NTT	- tersedianya data identifikasi cakupan pelayanan air minum provinsi NTT	1%	1.000	1%	1.060	1%	1.124	1%	1.191	1%	1.262	5%	5.637		
					- pengembangan sistem distribusi air minum	- terbangunnya jaringan distribusi air minum	1%	6.271	1%	6.647	1%	7.046	1%	7.469	1%	7.917	5%	35.350		
					- Pengembangan Air Minum Kawasan	- tersedianya air bersih di kawasan Kota Kupang dan Kabupaten Kupang	1%	2.000	1%	2.120	1%	2.247	1%	2.382	1%	2.525	5%	11.274		
3. Meningkatnya permukiman yang berkualitas dan produktif	2. Meningkatkan sistem pengelolaan sampah kawasan perkotaan	- Tereadinya sistem penanganan sampah perkotaan		1. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Proporsi Kualitas Perumahan dan Permukiman		-		1.000		1.000		2.000		2.000	27,27% (6 IbuKota)	6.000	Bidang Cipta Karya	6 Ibukota Kab/ Kota	
					- Peningkatan Sistem Pengelolaan Sampah	- Meningkatnya sistem pengelolaan sampah kawasan perkotaan	-	-	4,54% (1 IbuKota)	1.000	4,54% (1 IbuKota)	1.000	9,09% (2 IbuKota)	2.000	9,09% (2 IbuKota)	2.000	27,27% (6 IbuKota)			6.000
3. Meningkatnya permukiman yang berkualitas dan produktif	3. Meningkatkan pelayanan jalanan lingkungan	- Tersedianya jalan lingkungan kawasan perkotaan dan perdesaan		1. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Meningkatnya jumlah desa yg telah dikembangkan infrastrukturnya	699,2		10.888		11.997		12.332		12.443		12.555	21,5 % (699 Km)	60.215	Bidang Cipta Karya	22 Ibukota Kab/ Kota 22 Ibukota Kab/ Kota
					- Pengembangan Infrastruktur Perdesaan	- Terbangunnya jalan lingkungan perdesaan	20% dari Total Panjang 3.246 Km	0,3 % (10 Km)	10.888	0,3 % (10 Km)	10.997	0,3 % (10 Km)	11.107	0,3 % (10 Km)	11.218	0,3 % (10 Km)	11.330	1,5 % (50 Km)		
				- Identifikasi cakupan layanan infrastruktur perdesaan	- Tersedianya data layanan infrastruktur perdesaan		-		1.000		1.225		1.225		1.225		-	4.675		
4. Pembinaan bangunan gedung negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan	1. Terciptanya bangunan gedung negara yang memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan, kemudahan, efektif dan efesien	- Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya		1. Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Pembinaan jasa konstruksi, ketersediaan data PU yang termuktahir serta pelayanan jasa laboratorium pengujian														22 Kab/ Kota	
					- Penyusunan pedoman harga standar bangunan gedung negara	- Tersusunya Harga Standar Bangunan Gedung Negara	-	0	-	25%	150	25%	150	25%	150	25%	150	100%		600

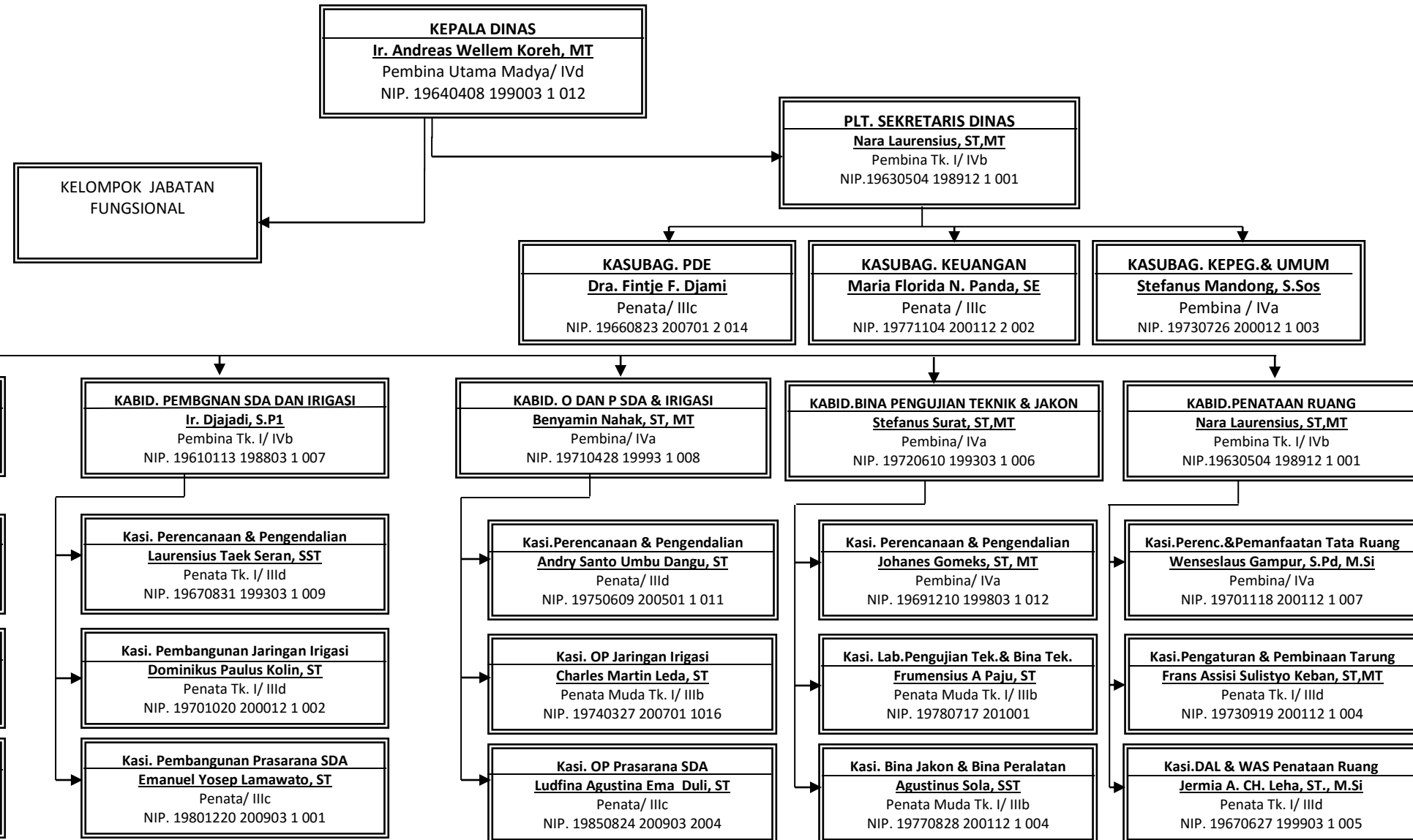
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
5. Meningkatkan Ketersedian Perumahan Rakyat yang Layak Huni	1. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Bagi MBR	- Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni			1. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Proporsi Kualitas Perumahan dan Permukiman		2.500			7.500		8.100		9.270		10.629		37.999	Bidang Cipta Karya	
					- Pembangunan Perumahan dan Permukiman	- Terbangunnya Rumah Sederhana	60%	-	-	0,25 % (150 Unit)	4.500	0,25 % (150 Unit)	4.500	0,25 % (150 Unit)	4.950	0,25 % (150 Unit)	5.445	1 % (600 Unit)	19.395	22 Kab/ Kota	
					- Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	- Terbangunnya Jalan Lingkungan Perkantoran (Km)	-	2,5	2.500	3	3.000	3,6	3.600	4,32	4.320	5,18	5.184	19	18.604	22 Kab/ Kota	
6. Melaksanakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi	1. Terciptanya Ruang Wilayah Provinsi Sesuai RTRW yang Telah Ditetapkan	- Tersusun dan terimplementasiakannya Perda RDTR di Kabupaten/ Kota			1. Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang	Meningkatnya pembinaan tata ruang wilayah provinsi															
					- Fasilitas dan Pembinaan Tata Ruang Wilayah Provinsi	- Terlaksananya Fasilitas dan Pembinaan Tata Ruang Wilayah Provinsi	-	0	-	25%	150	25%	150	25%	150	25%	150	100%	600	22 Kab/ Kota	
7. Memberdayakan Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang cipta karya	- Terciptanya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur keciptakaryaan di Kab/ Kota			1. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Proporsi Kualitas Perumahan dan Permukiman															
					- Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur	- Terlaksananya Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur	-	0	-	25%	150	25%	150	25%	150	25%	150	100%	600	22 Kab/ Kota	
8. Peningkatan Kualitas Usaha Jasa Konstruksi	1. Meningkatnya Pelayanan Badan Usaha Jasa Konstruksi	- Meningkatnya Jumlah Penerbitan IUJK yang sesuai aturan			1. Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Pembinaan jasa konstruksi, ketersediaan data PU yang termuktahir serta pelayanan jasa laboratorium pengujian		-			150		150		175		225		700	Bidang BPBT	
					- Pengaturan Jasa Konstruksi	- Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perda IUJK sesuai Peraturan perundang undangan tentang jasa konstruksi	22,72% (5 Kab/ Kota yang memiliki Perda IUJK sesuai Ketentuan)	-	-	18,18 % (4 Kab/Kota)	150	18,18 % (4 Kab/Kota)	150	18,18 % (4 Kab/Kota)	175	22,72 % (5 Kab/Kota)	225	100 % (22 Kab/ Kota)	700	22 Kab/ Kota	
9. Peningkatan Kemampuan dan Profesionalisme Tenaga Kerja Konstruksi	1. Meningkatkan Kuntitas dan Kualitas Tenaga Kerja Kontruksi yang Memiliki Sertifikat	- Tersedianya Penanggunjawab Teknik Badan Usaha Kecil			1. Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Pembinaan jasa konstruksi, ketersediaan data PU yang termuktahir serta pelayanan jasa laboratorium pengujian		600			800		1.000		1.200		1.400		5.000	Bidang BPBT	
					- Pemberdayaan Jasa Konstruksi	- Terlaksanya pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	25 % dari 4500 Badan Usaha	3% (150 Org)	600	4% (200 Org)	800	5% (250 Org)	1.000	6% (300 Org)	1.200	7% (350 Org)	1.400	25% (1250 Org)	5.000	22 Kab/ Kota	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
10	Terciptanya struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi dengan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas	1. Meningkatnya Kinerja Lembaga dalam Pengembangan Jasa Konstruksi NTT	- Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi yang Terkini Kab/ Kota	1. Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Pembinaan jasa konstruksi, ketersediaan data PU yang termuktahir serta pelayanan jasa laboratorium pengujian			-		250		250		300		300		1.100	Bidang BPBT	
				- Pengawasan Jasa Konstruksi	- Terlaksananya Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	0 Kab/ Kota	0%	-	22,73 % (5 Kab/ Kota)	250	22,73 % (5 Kab/ Kota)	250	27,27 % (6 Kab/ Kota)	300	27,27 % (6 Kab/ Kota)	300	100% (22 Kab/ Kota)	1.100	22 Kab/ Kota	
11	Meningkatkan kualitas penyusunan Program / Kegiatan Bidang PU dan Penataan Ruang serta peningkatan kualitas pengendalian bagi terwujudnya pembangunan	1. Terlaksananya Penyusunan Program serta Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang PU dan Penataan Ruang	- Tersedianya Data dan Informasi Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Bidang Ke-Puan di Kab/Kota	1. Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Pembinaan jasa konstruksi, ketersediaan data PU yang termuktahir serta pelayanan jasa laboratorium pengujian			1.750		1.925		2.118		2.329		2.562		10.684	Bidang BPBT	
				- Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu	- Terlaksananya pelayanan informasi pembangunan Bidang PU dan Penataan Ruang	0	20% (22 Kab/ Kota)	1.750	20% (22 Kab/ Kota)	1.925	20% (22 Kab/ Kota)	2.118	20% (22 Kab/ Kota)	2.329	20% (22 Kab/ Kota)	2.562	100% (22 Kab/ Kota)	10.684	22 Kab/ Kota	
12	Optimalisasi Pelayanan Jasa Pengujian dan Laboratorium	1. Terlaksananya pengujian dan laboratorium sesuai standar dan peraturan yang berlaku	- Tersertifikasinya dan Terakreditasinya Laboratorium pengujian	1. Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Pembinaan jasa konstruksi, ketersediaan data PU yang termuktahir serta pelayanan jasa laboratorium pengujian			2.400		2.472		2.546		2.623		2.701		12.742	Bidang BPBT	
				- Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian	- Terlaksananya Pelayanan Laboratorium Pengujian yang sesuai dengan aturan	Total Jenis Pengujian ..... Uji	3%	2.400	3%	2.472	3%	2.546	3%	2.623	3%	2.701	15%	12.742	Dinas PU	
13	Meningkatnya Pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan	1. Optimalisasi Produktifitas Peralatan dan Perbengkelan	- Tersedianya Peralatan Perbengkelan dalam Kondisi Siap Pakai	1. Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Pembinaan jasa konstruksi, ketersediaan data PU yang termuktahir serta pelayanan jasa laboratorium pengujian					750		750		1.125		1.125		3.750	Bidang BPBT	
				- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Kebina Margaan	- Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat	(Kondisi Baik & Rusak Ringan) 10 Unit	-	-	2 Unit (20 %)	750	2 Unit (20 %)	750	3 Unit (30 %)	1.125	3 Unit (30 %)	1.125	10 Unit (100 %)	3.750	Dinas PU	
14	Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan SDM Aparatur	1. Peningkatan Kompetensi Aparatur sesuai Bidang Tugasnya	- Tersedianya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Tugas	1. Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Pembinaan jasa konstruksi, ketersediaan data PU yang termuktahir serta pelayanan jasa laboratorium pengujian					200		200		200		200		800	Sekretariat	
				- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	- Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	-	-	-	20 Org (4,1 %)	200	20 Org (4,1 %)	200	20 Org (4,1 %)	200	20 Org (4,1 %)	200	80 Org (16,39 %)	800	Dinas PU	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
15 Memperbaiki Infrastruktur dalam Rangka Tanggap Darurat Bencana	1. Mengembalikan Fungsi Dasar Infrastruktur yang Rusak Akibat Bencana	- Tersedianya Kembali Aksesibilitas Pergerakan Barang/Jasa yang Rusak Akibat Bencana		1. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Terhubungnya kembali akses barang/ jasa yang terputus akibat bencana alam	0	-	-	3 Lokasi (21,47 %)	2.250	3 Lokasi (21,47 %)	2.250	4 lokasi (28,57 %)	3.000	4 lokasi (28,57 %)	3.000	14 Lokasi (100 %)	10.500	Bidang Bina Marga	Tempat Terjadinya Bencana
					- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam Tanggap Darurat															

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
(Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur NTT No. 90 Tahun 2016)

Kadaan : 31 Desember 2018







## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. ANDREAS W. KOREH, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI NTT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DRS. FRANS LEBU RAYA**

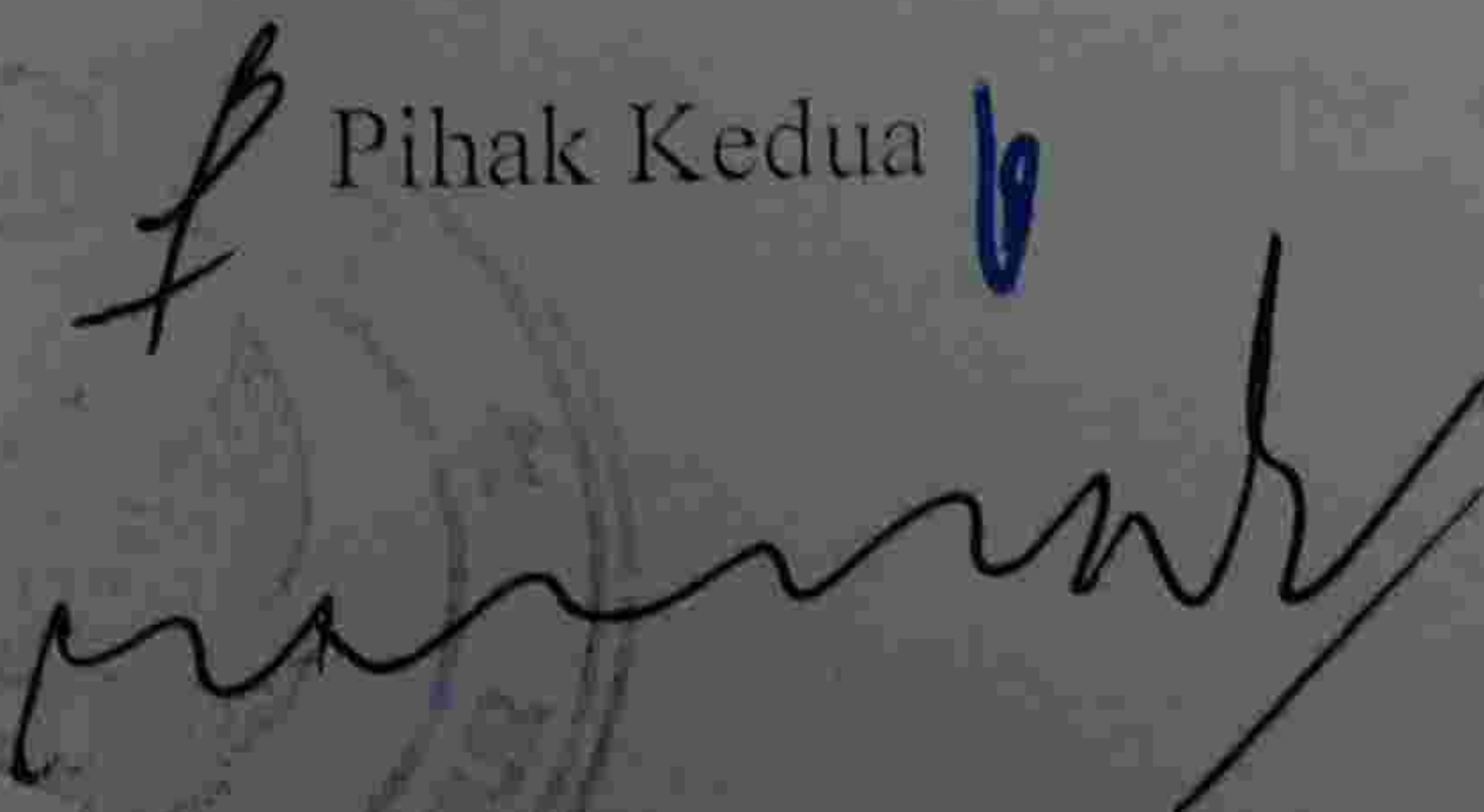
Jabatan : **GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supevisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Februari 2018

Pihak Kedua  
  
**DRS. FRANS LEBU RAYA**

Pihak Pertama  
  
**Ir. ANDREAS W. KOREH, MT**



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018  
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI NTT

TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya dan konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air	<p>Peningkatan Jaringan Irigasi D.I pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi</p> <p>Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Kecil</p> <p>Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi</p> <p>Terlaksananya Pembangunan Embung Kecil</p> <p>Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kawasan Kabupaten / Kota</p> <p>Terpeliharannya Bantaran dan tanggul sungai dan tersediannya data base sungai pada daerah irigasi kewenangan provinsi</p> <p>Terpeliharannya Bantaran dan tanggul sungai dan tersediannya data base sungai pada daerah irigasi kewenangan provinsi</p>	<p>12 Daerah Irigasi, 3 Paket Perencanaan</p> <p>5 Paket Pemeliharaan, 6 Paket Perencanaan</p> <p>30 Daerah Irigasi, 9 Paket Perencanaan</p> <p>16 Buah Embung Kecil, 6 Paket Perencanaan</p> <p>1 Kawasan</p> <p>3 Paket pemeliharaan, 3 Paket Perencanaan</p>
2	Meningkatnya dan akseibilitas barang mobilitas dan jasa	<p>1. Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>a. Pembangunan / Peningkatan Jalan</p> <p>b. Pembangunan Jembatan</p> <p>c. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan dengan DAK Infrastruktur Jalan</p> <p>d. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>e. Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan</p>	<p>Jalan Provinsi sepanjang 24,40 (HRS) dan 16,00 Km (GO)</p> <p>Jembatan sepanjang 65,00 M</p> <p>Pemb./ Peningk./ Rehab Pemel DAK untuk Jalan Provinsi sepanjang 6,10 Km</p> <p>7 Paket</p> <p>11 Paket</p>



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
		2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
		a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan	6 Paket
		b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jembatan	3 Paket
		c. Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	5 Paket
		d. Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	3 Paket
3	Tersusun dan terimplementasikannya Perda RDTR di Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	2 KSP
4	Meningkatnya Profesionalisme Badan Usaha Konstruksi	a. Pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran	s/d 100 %
		b. Pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran	s/d 100 %

#### PROGRAM


#### ANGGARAN (Rp)

1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi / Peningkatan Jaringan Irigasi	21,533,591,200
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Kecil	5,580,050,000
3	Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi SDA/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi	9,405,096,000
4	Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi SDA/ Terlaksananya Pembangunan Embung Kecil	22,571,400,000
5	Pengelolaan Sumber Daya Air/ Meningkatkan Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kawasan Kabupaten / Kota	3,750,000,000
6	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah, Bantaran Sungai dan Pengendalian Banjir	4,102,696,800
7	Pembangunan Jalan dan Jembatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan	166,672,648,000
8	Pembangunan Jalan dan Jembatan/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	19,624,770,000
9	Terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	3,042,481,000



10	Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum / Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	440,812,000
11	Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum / Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Pengujian	2,077,730,000
<b>JUMLAH</b>		<b>258,801,275,000</b>

Kupang, Februari 2018

  
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

DRS. FRANS LEBU RAYA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
 DAN PENATAAN RUANG PROVINSI  
 NUSA TENGGARA TIMUR

Ir. ANDREAS W. KOREH, MT





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama telp/Fax : -

PENETAPAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. NTT  
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2018

TRIWULAN : IV ( Oktober s/d Desember 2018 )

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI TRIWULAN III	CAPAIAN (%)	KET	PAGU ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kantor Dinas			PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.084.651.400	2.935.374.602	95,16		3.084.651.400
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1. Penyediaan Jasa surat Menyurat	17.812.000	17.808.000	99,98		17.812.000
	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	901.600.000	780.651.371	86,59		901.600.000
	Tersediannya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	100%	3.Penyediaan Jasa Jaminn Pemeliharaan Kesehatan PNS	45.200.000	45.200.000	0,00		45.200.000
	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	56.840.000	56.840.000	100,00		56.840.000
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	649.680.000	647.554.000	99,67		649.680.000
	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	100%	6. Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	280.900.000	266.945.000	95,03		280.900.000
	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.000.000	64.995.980	99,99		65.000.000
	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak, Penggandaan	100%	8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.000.000	41.892.250	99,74		42.000.000
	Terlaksananya Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.879.800	99,20		15.000.000
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan	100%	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	29.985.000	99,95		30.000.000
	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000	49.852.100	99,70		50.000.000
	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	100%	12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	182.500.000	182.067.898	99,76		182.500.000
	Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras Dinas	100%	13. Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	60.000.000	60.000.000	100,00		60.000.000
	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan & Tugas Lainnya Dalam Daerah	100%	14. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	212.000.000	210.060.250	99,09		212.000.000

	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	100%	15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	204.200.000	204.200.000	100,00		204.200.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	16. Pendidikan dan Pelatihan Formal	120.750.000	118.764.973	-		120.750.000
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	100%	17. Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	151.169.400	143.677.980	95,04		151.169.400
			<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>2.940.850.000</b>	<b>2.745.094.226</b>	<b>93,34</b>		<b>2.940.850.000</b>
	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Peralatan Gedung Kantor	100%	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	422.650.000	414.003.000	97,95		422.650.000
	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	100%	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	2.014.200.000	1.828.163.000	90,76		2.014.200.000
	Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional & Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional UPT	100%	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	200.000.000	199.886.426	99,94		200.000.000
		100%	4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	304.000.000	303.041.800			304.000.000
			<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>81.720.000</b>	<b>81.693.010</b>	<b>99,97</b>		<b>81.720.000</b>
	Terlaksanannya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, Penyelesaian Administrasi Tindak Lanjut LHP serta Pemutakhiran Data Aset	100%	1. Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81.720.000	81.693.010	99,97		81.720.000
<b>Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa</b>			<b>PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>191.424.004.870</b>	<b>189.473.652.476</b>	<b>98,98</b>		<b>191.424.004.870</b>
	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan	100%	1. Pembangunan Jalan dan Jembatan	168.359.716.870	166.834.064.530	99,09		168.359.716.870
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	100%	2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	23.064.288.000	22.639.587.946	98,16		23.064.288.000
			<b>PENGEMBANGAN DATA PERENCANAAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG</b>	<b>3.097.856.000</b>	<b>2.782.538.600</b>	<b>89,82</b>		<b>3.097.856.000</b>
		100%	Pembinaan Tata Ruang Wilayah Propinsi	3.097.856.000	2.782.538.600	89,82		3.097.856.000
<b>Meningkatnya Konservasi dan pendayagunaan Sumber Daya Air</b>			<b>PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b>	<b>8.493.292.480</b>	<b>7.961.579.726</b>	<b>93,74</b>		<b>8.493.292.480</b>
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kawasan Kabupaten / Kota	100%	1. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah, Bantaran Sungai dan Pengendalian Banjir	3.932.146.800	3.868.133.270	98,37		3.932.146.800
		100%	2. Peningkatan Pelayanan BLUD Sistem Penyediaan Air Minum	4.561.145.680	4.093.446.456	89,75		4.561.145.680

			PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI	64.054.880.250	56.797.403.074	88,67		64.054.880.250
	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	100%	1. Peningkatan Jaringan Irigasi	21.493.629.200	17.003.412.097	79,11		21.493.629.200
	Terlaksannya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	100%	2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi	9.579.021.000	8.641.099.294	90,21		9.579.021.000
	Meningkatnya Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung	100%	3. Pembangunan Embung Kecil	27.420.858.050	25.710.207.801	93,76		27.420.858.050
	Terlaksannya pembangunan embung kecil	100%	4. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung	5.561.372.000	5.442.683.882	97,87		5.561.372.000
Meningkatkan Profesionalisme Badan Usaha Konstruksi			MANAJEMEN DAN LAYANAN TATA LAKSANA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN	2.687.478.900	2.657.228.735	98,87		2.687.478.900
	Pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran	100%	1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	490.812.000	488.032.853	99,43		490.812.000
		100%	2. Peningkatan pelayanan jasa konstruksi dan laboratorium pengujian	2.196.666.900	2.169.195.882	98,75		2.196.666.900
JUMLAH				275.864.733.900	265.434.564.449	96,22		275.864.733.900

Jumlah Anggaran Terealisasi : 265.434.564.449

Program Administrasi Perkantoran 2.935.374.602

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.745.094.226

program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 81.693.010

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 189.473.652.476

Program Pengembangan Data Perencanaan Dan Pembinaan Tata Ruang 2.782.538.600

Program Pengelolaan sumber Daya Air 7.961.579.726

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 56.797.403.074

Program Manajemen dan Tatalaksana Infrastruktur Pekerjaan Umum 2.657.228.735